

**DAMPAK OTONOMI DAERAH TERHADAP PENURUNAN
ANGKA PENGANGGURAN DI KOTA PARIAMAN**

SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh
Gelara Sarjana Pendidikan*

OLEH:

SANDRA PUSPITA DEWI

NPM .1210013311009



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2017**

DAMPAK OTONOMI DAERAH TERHADAP PENURUNAN ANGKA PENGANGGURAN DI KOTA PARIAMAN

Sandra Puspita Dewi¹, Pebriyenni¹, Nurharmi¹
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Bung Hatta
E_mail: Sandra_puspita89@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi tingginya tingkat pengangguran masyarakat di Kota Pariaman. Istilah pengangguran digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan dengan ketidak adanya kegiatan seseorang. Pengangguran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan masyarakat sehari-hari, seperti: tidak memiliki pekerjaan, dan bekerja untuk beberapa hari saja karena tidak memiliki pekerjaan tetap. maka undang-undang 23 tahun 2014 yang mengatur pemerintahan daerah perlu disesuaikan, didasarkan pada pemikiran sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dengan memperhatikan prinsip demokrasi. Dengan adanya peningkatan pengangguran setiap tahunnya disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: kurangnya lapangan pekerjaan, komunikasi yang kurang lancar, kurang layak upah yang diterima, rendahnya pendidikan masyarakat dan SDM yang minim. Penelitian ini bertujuan 1. Untuk mengetahui dampak otonomi terhadap angka pengangguran di Kota Pariaman. 2. Untuk mengetahui selisih antara pertumbuhan lapangan pekerjaan dengan pencari kerja di Kota Pariaman. 3. Untuk mengetahui tindakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Kota Pariaman. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Instrumen yang digunakan adalah observasi, angket, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, keinginan masyarakat untuk bekerja sangat besar, namun dengan rendahnya pendidikan, dan tidak tersedianya lapangan pekerjaan menyebabkan meningkatnya angka pengangguran tersebut.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Pengangguran

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan ke hadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **Dampak Otonomi Daerah Terhadap Penurunan Angka Pengangguran di Kota Pariaman.**

Skripsi ini ditulis guna memenuhi salah satu persyaratan untuk meraih gelar sarjana pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (P.IPS) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Bung Hatta.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, karena keterbatasan yang peneliti miliki. Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua yang selalu member dukungan baik secara moril dan materi.
2. Ibu Dra. Pebriyenni, M.Si. selaku Pembimbing I telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada peneliti dengan sepenuh hati.
3. Bapak Drs. Nurharmi, M.Si. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada peneliti dengan sepenuh hati.

4. Ketua dan sekretaris Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (P.IPS) FKIP Universitas Bung Hatta Padang.
5. Dekan dan Wakil Dekan FKIP Universitas Bung Hatta Padang.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi PPKn Jurusan P.IPS FKIP Universitas Bung Hatta Padang.
7. Staf Tata Usaha, FKIP Universitas Bung Hatta Padang.
8. Bapak Ibrahim, staf ketenagakerjaan di Kota Pariaman.
9. Bapak Eri Gustian Kepala Lurah Karan Aur
10. Ibu Nurmiati Kepala Lurah Pasir
11. Saudari ku Ningsih Wulandari dan Resha Oktarina yang selalu menghibur
12. Sahabat ku Winda Sulastri dan Nur Surya Marlina yang selalu mendengarkan keluh kesahku
13. Arizkhi Otavino yang selalu menghibur, menyemangati dan juga mengingatkan dalam penulisan.
14. Rekan-rekan sesama mahasiswa, khususnya Program Studi PPKn Jurusan P.IPS FKIP Universitas Bung Hatta Padang.
15. Serta pihak-pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terwujud.

Semoga Allah, membalas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti dengan rahmat yang berlimpah ganda, dan peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua yang membaca.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR BAGAN.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Batasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	10
BAB II KERANGKA TEORETIS	11
2.1 Kajian Teori	11
2.1.1 Tinjauan Umum tentang Otonomi Daerah.....	11
2.1.1.1 Pengertian Otonomi Daerah.....	11
2.1.1.2 Tujuan Otonomi Daerah.....	12
2.1.1.3 Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah.....	14
2.1.1.4 Asas-Asas Otonomi Daerah	15
2.1.2 Tinjauan tentang Pengangguran.....	19
2.1.2.1 Pengertian Pengangguran.....	19
2.1.2.2 Jenis Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya	19
2.1.2.3 Jenis-jenis Pengangguran Berdasarkan Cirinya.....	20
2.1.2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengangguran.....	21
2.1.3 Tinjauan Umum Tentang Kota Pariaman	22

2.1.3.1	Sejarah Berdirinya Kota Pariaman.....	22
2.1.3.2	Letak Geografis Kota Pariaman.....	23
2.1.3.3	Keadaan Penduduk, Ekonomi dan Pendidikan	24
2.2	Penelitian Relevan	28
2.3	Kerangka Konseptual	29
2.4	Pertanyaan Penelitian	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		32
3.1	Jenis Penelitian	32
3.2	Lokasi Penelitian	33
3.3	Populasi dan Sampel	33
3.3.1	Populasi	33
3.3.2	Sampel	33
3.4	Variabel	34
3.4.1	Variabel Terikat	34
3.4.1	Variabel Bebas	34
3.5	Indikator Variabel	34
3.5.1	Indikator Variabel Bebas	34
3.5.2	Indikator Variabel Terikat.....	35
3.6	Jenis Data	35
3.6.1	Data Primer	35
3.6.2	Data Sekunder	35
3.7	Sumber Data	35
3.8	Teknik Pengumpulan Data	35
3.9	Instrumen Penelitian	36
3.10	Teknik Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Hasil Penelitian	39
4.1.1 Deskripsi tentang Kelurahan Pasir dan Kelurahan Karan Aur	39
4.1.1.1 Keadaan Geografis	39
4.1.1.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Organisasi Kelurahan.....	42
4.1.1.3 Kependudukan.....	43
4.1.1.4 Pendidikan.....	45
4.2 Pembahasan.....	51
4.2.1 Deskripsi Dampak Otonomi Daerah Terhadap angka Pengangguran di Kota Pariaman.....	52
4.2.2 Deskripsi Pertumbuhan Lapangan Pekerjaan sesuai dengan Pertumbuhan pencari kerja di Kota Pariaman	53
4.2.3 Deskripsi Tindakan Pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Kota Pariaman.....	54
4.3 Jawaban Pertanyaan Penelitian	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 01: Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2013-2015 di Kota Pariaman	6
Tabel 02: Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah.....	25
Tabel 03: Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki	26
Tabel 04: Komposisi Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Angkatan Kerja.....	26
Tabel 05: Komposisi Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bukan Angkatan Kerja.....	26
Tabel 06: Jumlah Sekolah, Kelas dan Guru Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Pariaman, 2015	27
Tabel 07: Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Pariaman	43
Tabel 08: Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Pariaman	44
Tabel 09: Persentase penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut ijazah yang dimiliki, di Kota Pariaman.	45
Tabel 10: Persentase menganggur Karena Tingkat Pendidikan yang Rendah dan Pertumbuhan Lapangan Pekerjaan yang Tidak Sesuai Dengan Pertumbuhan Pencari Kerja	46
Tabel 11: Pekerjaan Masyarakat Pengangguran dan Rata-rata Penghasilan Kelurahan Pasir	48
Tabel 12: Pekerjaan Masyarakat Pengangguran dan Rata-rata Penghasilan Kelurahan Karan Aur	49

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 01: Kerangka Konseptual.....	39
Bagan 02: Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan	53

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I : Lembaran Observasi.....	66
Lampiran II : Pedoman Wawancara	67
Lampiran III : Kuesioner.....	69
Lampiran IV : Dokumentasi.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Konsep otonomi daerah pada awalnya lebih merupakan dampak dari pertumbuhan ekonomi, dari pada tuntutan demokrasi masyarakat (pemerintah) lokal. Pemerintah daerah yang otonom pada dasarnya merupakan penolakan atau perlawanan terhadap paradigma pembangunan yang bersifat sentralistik yang penuh dengan muatan dan ketergantungan pada anggaran pemerintah pusat yang membuat pemerintah dan masyarakat daerah sangat tak berdaya dalam pelaksanaannya. Paradigma seperti itu, hanya akan menciptakan akumulasi aset oleh segelintir orang/kelompok di pusat (kelompok orang yang berkuasa di pemerintahan), karena kewenangan itu pada umumnya berada pada satu titik yaitu ditangan pemerintah pusat, dimana segala sesuatu diatur dan diselenggarakan oleh pusat.

Berdasarkan UUD Tahun 1945 pasal 1 tentang bentuk dan kedaulatan, Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dan merupakan Negara Hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi. Desentralisasi merupakan asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah.

Pada dasarnya latar belakang perubahan UU No. 22 Tahun 1999, memberikan *feedback* pada filosofi UU No 23 Tahun 2014. Dari aspek dasar hukum tata negara, karena UUD RI tahun 1945 telah mengalami amandemen,

khususnya pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan sistem pemerintahan daerah, yaitu pasal 1,5, 18, (a,b), 20, 21, 22 (d), 23 (e ayat 2), 24, (ayat 1), 31 (ayat 1), 33, dan 34, maka undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah perlu disesuaikan, didasarkan pada pemikiran bahwa sesuai dengan amanat UUD 1945 (hasil amandemen), pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. diharapkan juga mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang.

Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan Daerah yang baru mewajibkan pemerintah melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan, memberikan standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Bersamaan dengan itu pemerintah wajib

memberikan fasilitas berupa peluang kemudahan bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dapat melakukan otonomi secara efektif dan efisien.

Dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, dikemukakan bahwa:

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Pembentukan daerah tersebut harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat dasar dan syarat administratif. Bagaimanapun suatu proses politik harus diletakkan pada nilai yang paling luhur, yaitu demi kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah berorientasi kepada pembangunan, yaitu pembangunan dalam arti luas, yang meliputi semua segi kehidupan dan penghidupan.

Masalah pengangguran telah menjadi momok yang begitu menakutkan khususnya di daerah-daerah yang baru berkembang seperti Kota Pariaman. Pariaman seringkali dihadapkan dengan besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan dan besarnya jumlah penduduk. Sempitnya lapangan pekerjaan dikarenakan faktor kelangkaan modal untuk berinvestasi. Pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah sosial politik yang juga semakin meningkat. dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar, arus imigrasi yang terus mengalir, serta dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini, membuat permasalahan tenaga kerja menjadi sangat besar dan kompleks. Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja

tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2), "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Pasal tersebut juga dapat diterjemahkan bahwa sebenarnya seluruh warga negara Indonesia tidak berkeinginan menjadi pengangguran dan juga tidak ingin menjadi orang miskin. Yang dimaksud dengan pengangguran adalah orang yang tidak bekerja ataupun orang yang tidak mempunyai pekerjaan.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja tetapi juga dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif antara lain mencakup tentang pelayanan penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan hubungan industrial.

Menurut Mankiw (2006:154), "Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat". Sedangkan menurut Yulhendri (2009:61), "Pengangguran merupakan tingkat penduduk usia produktif yang tidak bekerja baik secara sukarela tidak bekerja maupun yang terpaksa tidak bekerja". Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa pengangguran merupakan orang yang tidak

bekerja, yang merupakan masalah ekonomi yang mempengaruhi manusia baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Kota Pariaman sudah menjadi daerah administratif sejak Tahun 2002. dan menjadi bagian dari pemekaran Kabupaten Padang Pariaman pada waktu ditetapkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1986 yang diresmikan tanggal 29 oktober 1987 tentang Pembentukan Kota Pariaman, maka Kota Pariaman secara resmi telah menjadi daerah yang otonomi, dan secara administratif tidak lagi berada dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Pembentukan Kota ini merupakan solusi untuk mengejar berbagai keteringgalan di bidang pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa pada kenyataannya dasar terbentuknya suatu Kota adalah untuk menjalankan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dasar Pembentukan Kota Pariaman adalah Undang-Undang No. 33 Tahun 1986 tentang pembentukan Kota Pariaman.

Meskipun sudah menjadi otonom, masih banyak terdapat masalah yang dihadapi oleh pemerintah dibidang ketenagakerjaan, yaitu masalah pengangguran. pembangunan ekonomi yang telah tercipta tidak sanggup mengadakan kesempatan kerja yang lebih cepat daripada pertambahan penduduk yang berlaku. Oleh karenanya, masalah pengangguran yang mereka hadapi dari tahun ke tahun semakin bertambah serius.

Menurut hasil wawancara peneliti pada hari Selasa pukul 14:00, tanggal 14 September 2016 di Kantor Dinas Sosial dengan Bapak Afnil, S.Pd sebagai Staf di Dinas Sosial, yang mengatakan bahwa:

Penyebab terjadinya pengangguran di antaranya adalah karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja, diantara masalah itu seperti: 1) tingginya pertumbuhan penduduk. 2) masih banyak orang tidak bekerja. 3) lapangan pekerjaan yang sempit. 4) akses layanan tidak lancar. 5) masih banyak yang tidak tamat sekolah dasar. 6) kurangnya perhatian terhadap pendidikan.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dibidang ketenagakerjaan adalah masalah pengangguran. Permasalahan tersebut terkait dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan kesempatan kerja atau usaha yang sedikit. Oleh karenanya berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menekan laju pertumbuhan penduduk dan dapat membuka lapangan kerja seluas mungkin untuk dapat menurunkan tingkat pengangguran di masa yang akan datang.

Indikator yang bisa digunakan untuk melihat tingkat pengangguran adalah tingkat pengangguran terbuka, yang merupakan proporsi penduduk yang mencari pekerjaan terhadap jumlah angkatan kerja. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel 01: Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2013-2015 di Kota Pariaman

No	Jenis Kelamin	Jumlah		persentase	
		2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Laki-laki	4570	1990	11,10	4,76
2	Perempuan	4446	3906	10,49	9,10
3	Laki-laki + Perempuan	9073	5600	10,85	6,61

Sumber: BPS Kota Pariaman (2015)

Dengan melihat tabel 01, dapat dipastikan bahwa tingkat pengangguran di Kota Pariaman pada tahun 2014 masih tinggi. Data ini diambil dari Badan Pusat

Statistik Kota Pariaman dalam angka 2015 yaitu “Jumlah pengangguran di Kota Pariaman pada tahun 2014 laki-laki sebesar 11,10% dan perempuan sebesar 10,49% dari angkatan kerja atau yang sedang mencari pekerjaan. Dari kondisi ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, sehingga penduduk laki-laki lebih mudah mendapat pekerjaan daripada perempuan. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan 2015 angkatan kerja mengalami penurunan sebesar 4,24% di tahun 2015. Jadi baik laki-laki maupun perempuan mengalami penurunan yaitu turun sebesar 6,34% untuk laki-laki dan 1,39% untuk perempuan di Kota Pariaman.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pariaman pada tahun 2015 jumlah penduduknya adalah 84.709 orang yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 41.780 orang dan penduduk perempuan berjumlah 42.929 orang, atau mengalami peningkatan sekitar 1,09% jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2014 yang tercatat sebanyak 83.610 orang.

Sesuai dengan uraian tersebut, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Dampak Otonomi Daerah terhadap Penurunan Angka Pengangguran di Kota Pariaman”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Angka pengangguran masih tinggi di Kota Pariaman
2. Pertumbuhan penduduk masih tinggi di Kota Pariaman
3. Masih banyak masyarakat pendidikannya tidak tamat Sekolah di Kota Pariaman
4. Pertumbuhan lapangan pekerjaan tidak sesuai dengan pertumbuhan pencari kerja di Kota Pariaman

1.3 Batasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan serta kemampuan peneliti yang terbatas, maka penelitian ini dibatasi pada:

1. Terjadi kecenderungan kenaikan angka pengangguran di Kota Pariaman
2. Pertumbuhan lapangan pekerjaan tidak sesuai dengan pertumbuhan pencari kerja di Kota Pariaman
3. Upaya pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran di Kota Pariaman ?

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah, maka peneliti merumuskan permasalahan yang diteliti dengan maksud untuk menghindari kesalahan penafsiran dan lebih mengenai sasaran, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak otonomi daerah terhadap pengangguran di Kota Pariaman?

2. Apakah pertumbuhan lapangan pekerjaan sesuai dengan pertumbuhan pencari kerja di Kota Pariaman ?
3. Bagaimana tindakan pemerintah daerah dalam mengatasi angka pengangguran di Kota Pariaman?

1.5 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak otonomi daerah terhadap angka pengangguran di Kota Pariaman
2. Untuk mengetahui selisih antara pertumbuhan lapangan pekerjaan dengan pencari kerja di Kota Pariaman
3. Untuk mengetahui tindakan pemerintah daerah dalam mengatasi angka pengangguran di Kota Pariaman?

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Bagi peneliti, dapat di gunakan sebagai pedoman penelitian selanjutnya mengenai dampak otonomi daerah terhadap penurunan angka pengangguran di Kota Pariaman.
 - b. Dapat menambah pengetahuan serta wawasan bagi peneliti mengenai masalah pengangguran yang meningkat setiap tahunnya di Kota Pariaman.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi pemerintah daerah Kota Pariaman, penelitian ini dapat dijadikan pemahaman mengetahui akibat sekaligus dapat mengatasi masalah pengangguran di Kota Pariaman.
- b. Bagi masyarakat menambah pengetahuan tentang dampak otonomi daerah terhadap penurunan angka pengangguran di Kota Pariaman.